

Hasil Penelitian

ANALISIS STRUKTUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI BANTEN

(ANALYSIS OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUES (PAD) STRUCTURES OF BANTEN PROVINCE)

Moh Sofyan Budiarto

Bappeda Provinsi Banten
Jl. Syeh Nawawi Al Bantani KP3B Serang
email : budiarto.sofyan@gmail.com

Diterima: 12 Juni 2017; Direvisi: 15 juli 2017; Disetujui: 9 September 2017

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang utama di Provinsi Banten yang diperoleh dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan sumber PAD lainnya yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur komponen Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan jenis dan besar kontribusinya. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2013 -2016. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi PAD rata-rata terhadap Penerimaan Daerah 2013-2016 sebesar 66% menjadi yang terbesar disusul dengan Dana Perimbangan sebesar 22 % dan Pendapatan lainnya yang sah sebesar 12 %. Pajak Daerah memberikan kontribusi rata-rata tertinggi sebesar 95,5 % terhadap struktur PAD, disusul retribusi daerah sebesar 1,3 %, dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 1 % dan lain-lain PAD yang sah sebesar 2,2 %. Dari komponen Pajak Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) (41%) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (34 %) menjadi dua kontribusi paling besar terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Banten. Retribusi jasa umum menjadi penyumbang paling tinggi (88,1 %) dari Retribusi disusul retribusi jasa usaha (6,6%) dan retribusi perizinan (5,3%).

Kata kunci: pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, bea balik nama kendaraan bermotor

ABSTRACT

Original Local Government Revenue (PAD) is still a major source of development financing in Banten Province obtained from local taxes, regional retribution, profits from regionally-owned enterprises (BUMD), and other legitimate sources of PAD. The purpose of this study is to analyze the structure of the Revenue component of the Region in accordance with the type and size of its contribution. This research uses descriptive qualitative method by utilizing data realization of Banten Province Revenue year 2013 -2016. The results show that the average contribution of PAD to Regional Revenue 2013-2016 is 66% to become the largest followed by Balance Fund equal to 22% and other valid Revenue equal to 12%. Local Taxes contributed the highest average of 95.5% to the PAD structure, followed by regional levy of 1.3%, and local financial management by 1% and other valid PAD of 2.2%. Of the components of Regional Taxes, Motor Vehicle Name Fee (BBNKB) (41%) and Motor Vehicle Tax (PKB) (34%) became the two largest contributions to the original income of the province of Banten. Public service levies accounted for the highest contribution (88.1%) of retribution followed by business services levies (6.6%) and user fees (5.3%).

Keywords: regional local government revenues, local tax, local retribution, transfer of motor vehicle fee

PENDAHULUAN

Di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah jargon atau istilah tentang kemandirian daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Erlangga (2005). Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dimulai dari berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, implikasi dari pemberlakuan kedua UU ini adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Josef (1991); Imron (2015). Perubahan UU terkait desentralisasi dan otonomi daerah juga diikuti dengan perubahan UU yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa a) kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, b) kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, c) hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana pembagian lainnya, d) hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan sumber-sumber pembiayaan, Dedy (2006).

Hal ini memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan catatan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, Hartoyo, (2015); Haryanto, (2016). Di Hampir semua daerah, PAD masih menjadi sumber pendanaan utama pembangunan daerah, sehingga struktur PAD menjadi penting untuk menentukan target dan strategi peningkatan PAD pada tahun berikutnya. Sampai saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakooptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Haryanto (2016); Imron (2015). Di sisi lain, sering kali pengeluaran biaya

yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Haranto (2016).

Di Provinsi Banten, PAD juga masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah. Sumber pendapatan yang lain belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Analisis struktur PAD dapat memberikan gambaran trend dan pola unsur-unsur PAD sebagai dasar ilmiah sejauh mana kecenderungannya pada tahun yang akan datang dan menjadi dasar mencari sumber sumber PAD lainnya yang potensial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur Pendapatan Asli Daerah Banten dilihat dari seluruh komponennya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis upaya peningkatan penerimaan daerah Provinsi Banten ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode, diskriptif kualitatif. Data yang dipakai adalah data sekunder terkait dengan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Data primer diperoleh dengan wawancara terstruktur terhadap pejabat pengelola keuangan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, sebagai data penunjang dan konfirmasi data sekunder. Pendalaman dilakukan terhadap sumber sumber lain, seperti literatur dan hasil penelitian yang mendukung, serta informasi tentang perkembangan objek penelitian dan kebijakan maupun peraturan pada bidang yang terkait. Desk study dilakukan dengan mengkaji secara lebih mendalam dari berbagai literatur dan kajian sejenis dan lainnya yang berkaitan yang pernah dilakukan sebelumnya tentang penelitian analisis struktur PAD di daerah lain sebagai pembanding. Pendekatan Desk Study adalah juga dipergunakan untuk melakukan review atas kebijakan dan peraturan terkait PAD yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Analisis trend dilakukan untuk melihat pola kecenderungan pergerakan perubahan pertumbuhan komponen komponen PAD dari 2013 sampai 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis struktur PAD dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu membuat deskripsi atas perkembangan target dan realisasi PAD.

Pendekatan juga digunakan analisis time-series untuk menghitung laju pertumbuhan dan, analisis cross-section untuk melihat kontribusi masing-masing komponen.

Sesuai UU No 33 Tahun 2004 tentang 'Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah' Bab IV Sumber Penerimaan Daerah pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa sumber pendapatan terdiri atas 3 sumber penerimaan, yaitu;

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan dan
3. Lain-lain Pendapatan

Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, di Provinsi Banten, PAD secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 67,82 persen atau 4,86 Trilyun dari rerata total penerimaan daerah Provinsi Banten 2013-2016. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.

Dari grafik tersebut dapat dilihat pergerakan dari Total Penerimaan Daerah memiliki pola yang sama dengan pergerakan dari PAD. Walaupun antara tahun 2014-2015 Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Banten mengalami penurunan dan naik pada 2016, secara keseluruhan total penerimaan Provinsi Banten masih mengalami kenaikan sebagai akibat naiknya share PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Melihat kondisi di atas menunjukkan bahwa peran PAD untuk Provinsi Banten sangat dominan dalam menyumbang Penerimaan Daerah.

Seperti telah diungkapkan di awal, komponen Pendapatan Asli Daerah terbagi lagi ke dalam beberapa komponen pembentuknya. Untuk Provinsi Banten, PAD sebagian besar dihasilkan oleh Pajak Daerah. Pada gambar 2, dapat dilihat, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 besarnya PAD dapat melewati angka 5 triliun rupiah dan pada RAPBD 2017 telah ditargetkan sebesar 5,6 triliun rupiah.

Walaupun memiliki kontribusi yang paling besar, komponen Pajak Daerah memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak tinggi. Pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 12,72 persen. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada komponen Retribusi Daerah, yaitu rata-rata sebesar 86,24,65 persen. Untuk gambaran lebih lengkap mengenai pertumbuhan komponen PAD ini, dapat dilihat pada tabel 1.

Besarnya kontribusi pajak daerah dalam menyumbang PAD tidak hanya terjadi pada perekonomian Banten saat ini saja tetapi juga masih menjadi harapan besar perekonomian Banten ke depan, hal ini dapat dilihat dalam RAPBD 2017 kontribusi pajak masih menjadi target yang terbesar. Pada tabel 2, di bawah ini dapat dilihat pada jangka waktu 2013 sampai

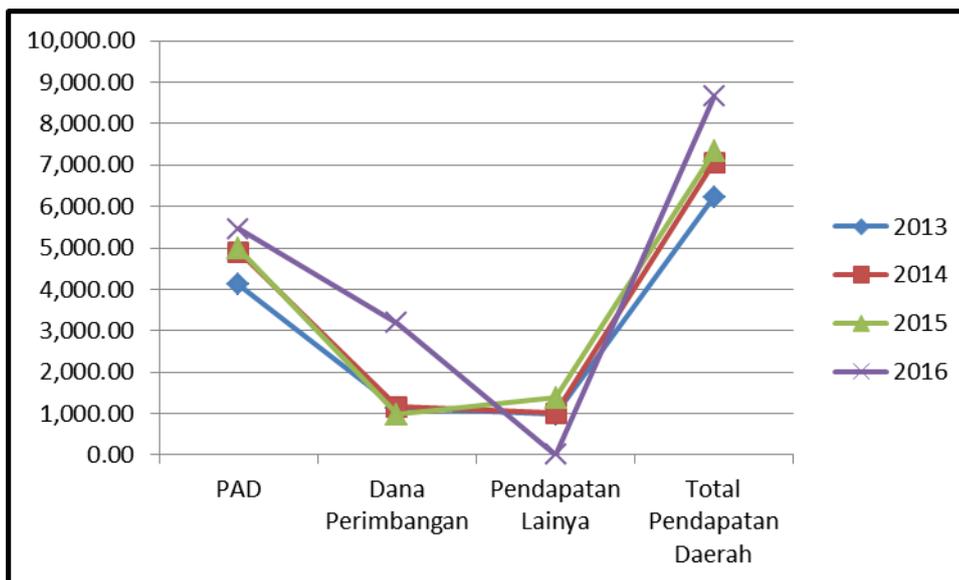
tahun 2016 rata-rata kontribusi pajak daerah menyumbang PAD sebesar 94,97 persen, bahkan untuk RAPBD 2017 ditargetkan meningkat pada angka 95,17 persen.

Dari sumber DPPKAD, pergerakan PAD Provinsi Banten memiliki trend yang meningkat pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu jangka waktu antara tahun 2006 sampai tahun 2016. Walaupun dengan trend yang meningkat, pertumbuhan PAD memiliki trend sebaliknya mulai pada tahun 2010 terus memiliki pertumbuhan yang melambat. Pada tahun 2006 sampai tahun 2008 pertumbuhan PAD meningkat cukup signifikan mendekati angka 30 persen, namun pada tahun 2009 turun drastis pertumbuhan PAD hanya tinggal 1,6 persen. Peningkatan pertumbuhan PAD kembali signifikan terjadi pada tahun 2010 mencapai angka 37,56 persen dengan trend selanjutnya sampai tahun 2016 terus mengalami pertumbuhan yang melambat dengan penurunan yang sangat drastis dari pertumbuhan 18,95 persen tahun 2014 hanya tinggal 1,48 persen pada tahun 2015 dan menguat kembali mendekati 5 % pada 2016. Untuk gambaran lebih lengkap mengenai pertumbuhan PAD dapat dilihat pada gambar 3.

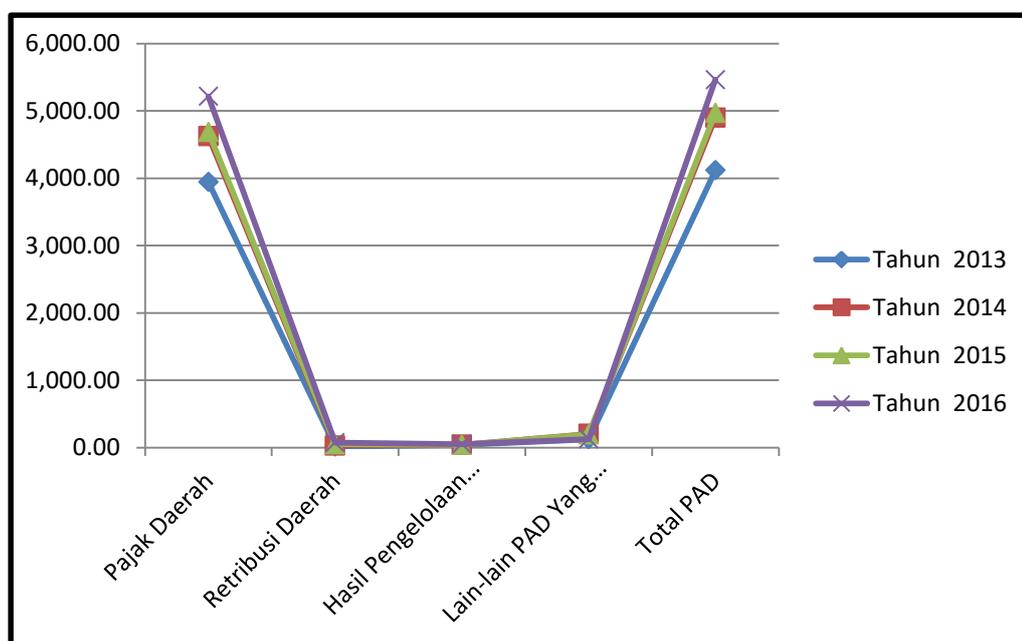
Pelambatan pertumbuhan PAD mulai tahun 2010 yang terjadi seiring dengan pelambatan pertumbuhan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah, hal ini mengingat bahwa pajak adalah penyumbang terbesar PAD Provinsi Banten. Dari grafik gambar 4.3. di bawah dapat dilihat terjadinya pelambatan pertumbuhan pajak daerah mulai tahun 2010 sampai tahun 2015. Bila dilihat secara keseluruhan periode jangka waktu antara tahun 2006 sampai tahun 2016 pergerakan antara pertumbuhan PAD memiliki pola yang sama dengan pergerakan penerimaan pajak daerah. Untuk Provinsi Banten, dari kedua komponen PAD memperlihatkan bahwa pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah selalu lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan Lain-Lain PAD Yang Sah. Namun tidak demikian untuk kedua komponen lainnya, terlihat pergeseran pertumbuhan Pajak Daerah mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 menjadi jauh dibawah pertumbuhan retribusi daerah.

Dasar hukum pengaturan pajak dan retribusi untuk Provinsi Banten adalah pada Perda Pemrov Banten No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Perda Pemrov Banten No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Jenis Pajak yang menjadi kewenangan Provinsi Banten adalah;

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)



Gambar 1. Pergerakan Penerimaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2016
Sumber : Data diolah



Gambar 2. Komponen PAD Provinsi Banten Tahun 2013-2016.

Tabel 1. Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten (%)

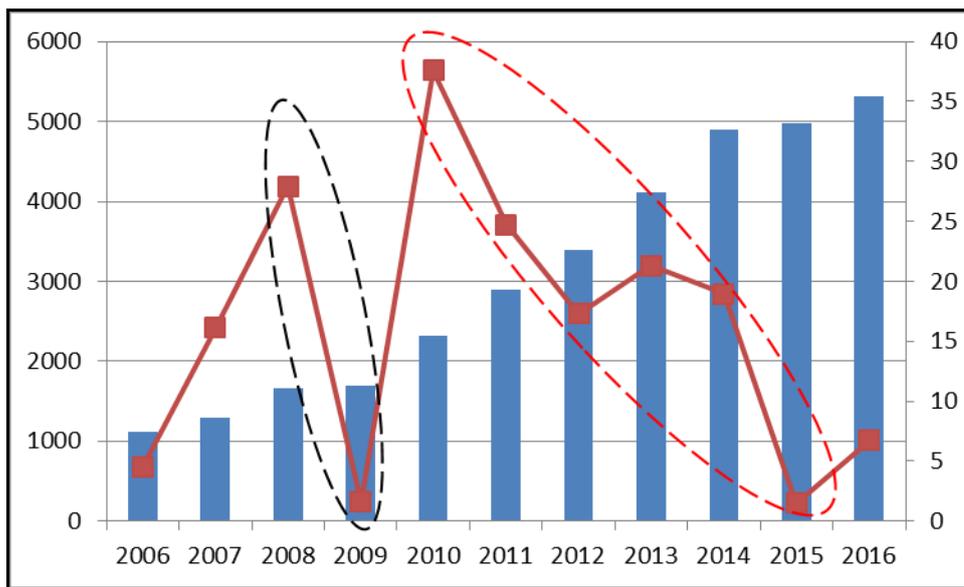
Jenis Pajak	Tahun 20xx				Rata Rata
	13-Dec	13-14	14-15	15-16	
Pajak Daerah	21.06	17.26	1.35	11.2	12.72
Retribusi Daerah	112.92	124.84	55.18	52.01	86.24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	18.71	10.67	0.04	18	11.86
Lain-lain PAD Yang Sah	23.43	64.28	-0.33	-3.56	20.96

Sumber: data diolah

Tabel 2. Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten (%)

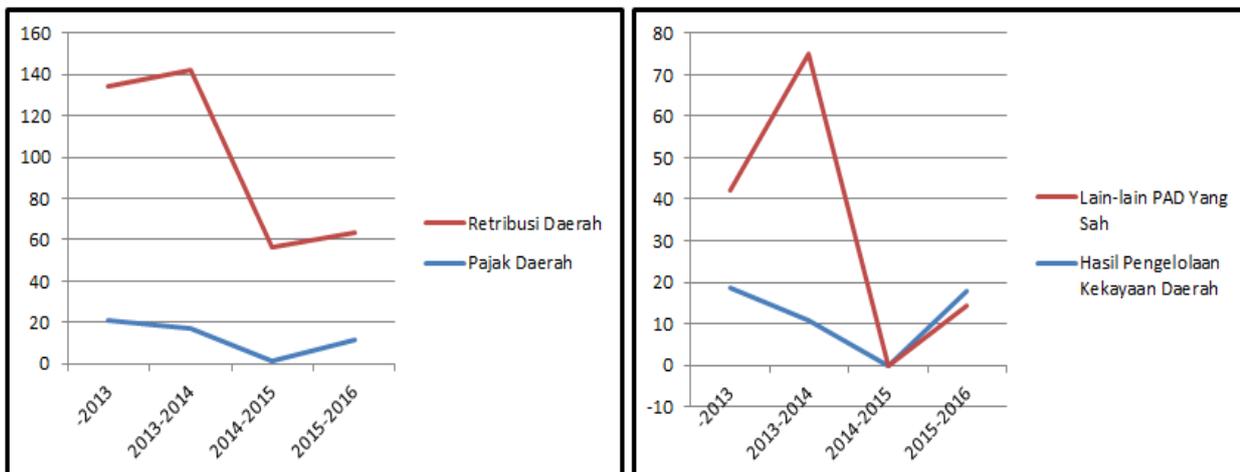
Komponen PAD	Tahun				Rata Rata
	2013	2014	2015	2016	
Pajak Daerah	95.76	94.39	94.27	95.46	94.97
Retribusi Daerah	0.33	0.63	0.96	1.32	0.81
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0.93	0.87	0.85	0,92	0.66
Lain-lain PAD Yang Sah	2.98	4.12	3.92	2,30	2.75

Sumber : Data diolah



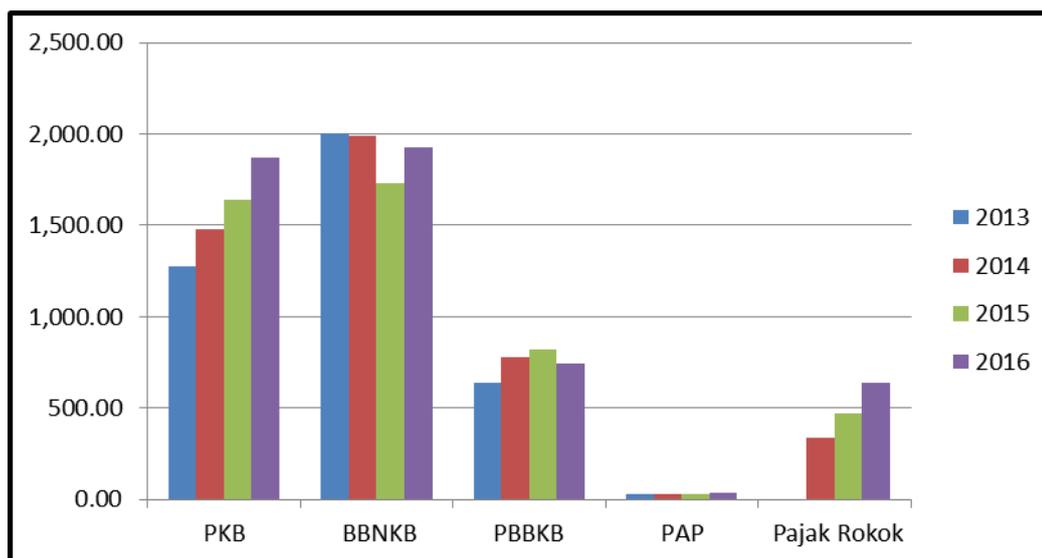
Gambar 3. Pergerakan PAD (Milyar) dan Pertumbuhan PAD (%) Provinsi Banten

Sumber: DPPKD Provinsi Banten



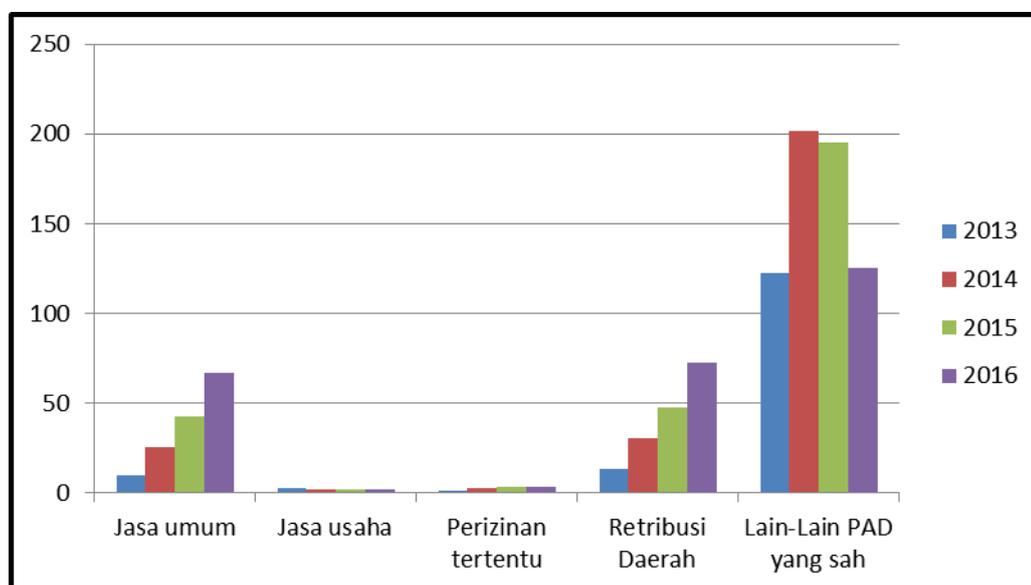
Gambar 4. Pergerakan Pertumbuhan Komponen PAD Provinsi Banten (%)

Sumber: Data diolah



Gambar 5. Gambar Komponen Pajak Daerah 2013-2016 (Milyar Rupiah)

Sumber : Data diolah



Gambar 6. Grafik Perkembangan Retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah 2013-2016 (Milyar Rupiah)

Sumber : Data diolah

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan (AP)
5. Pajak Rokok.

Sedangkan untuk jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Provinsi Banten adalah:

1. Retribusi jasa umum meliputi: pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak peta, pelayanan tera/tera ulang dan pelayanan pendidikan.

2. Retribusi jasa usaha meliputi; pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kepelabuhanan, penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu meliputi: retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

Dari kelima sumber penerimaan pajak daerah tersebut, BBNKB secara rata-rata memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 41,4 persen dengan angka rata-rata 1,91 triliun disusul PKB dengan angka 33,9 persen dengan angka 1,56 triliun. Hal ini dapat dilihat dari

gambar 5, di bawah ini. Retribusi Jasa Umum secara rata-rata memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 88,1 persen dengan angka 36 milyar dari total retribusi daerah. Perkembangan komponen retribusi dapat dilihat pada gambar 6.

Pajak daerah dan pajak rokok mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2013 sampai dengan 2016, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013 ke 2015 dan rebound pada 2016. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Terlihat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi penyumbang terbesar Pajak Daerah.

Pada gambar 6, Retribusi jasa umum menjadi penyumbang paling tinggi disusul retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan. Lain lain PAD yang sah juga memberikan kontribusi terhadap PAD lebih tinggi dari retribusi daerah. Komponen denda pajak pada Lain lain PAD yang sah memberikan pengaruh signifikan peningkatan PKB dan BBNKB sebagai imbas dari pembebasan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 2013 sampai dengan 2016 memberikan sumbangan sebesar 95,5 % terhadap sumber penerimaan daerah Provinsi Banten, disusul dengan Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya. Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap PAD tertinggi, sedangkan retribusi meningkat melampaui hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2013 -2016.

Penyumbang terbesar pajak daerah adalah BBNKB dengan kontribusi rata-rata sebesar 41% disusul PKB dengan 34% persen, BBNKB (16 %), pajak air permukaan (0,1%) dan pajak rokok (8%). Penyumbang retribusi daerah tertinggi adalah retribusi jasa umum(88 %) besarnya jauh di atas dua jenis retribusi lainnya yaitu retribusi jasa usaha (5,3 %) dan retribusi perizinan (6,7 %). Dilihat dari perolehan nominal, penerimaan retribusi masih sangat kecil bila dibandingkan dengan penerimaan pajak.

REKOMENDASI

1. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda Provinsi Banten) perlu meningkatkan layanan terhadap wajib pajak. Langkah inovasi dalam pelayanan wajib pajak diperlukan guna terus meningkatkan kontribusi Pajak Daerah sebagai penyumbang PAD di Provinsi Banten. Beberapa upaya yang direkomendasikan

untuk meningkatkan PAD yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Upaya intensifikasi Pajak Daerah:
 - Kegiatan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau pemutihan.
 - Kordinasi dengan Lembaga Pembiayaan/Leasing.
 - Kordinasi dengan Kepolisian dan Jasa Raharja terkait pendataan jumlah kendaraan bermotor termasuk data motor hilang menjadi potensi hilangnya pajak.
 - Mempermudah proses mutasi
 - Pembebasan denda pajak.
 - b. Upaya peningkatan pelayanan:
 - Samsat keliling (*door to door*)
 - Pembentukan dan penambahan gerai samsat
 - Samsat Drive-Thru
 - Pembayaran online dan fasilitas mobil keliling, dibuka gerai pajak di beberapa daerah, pelayanan online lewat sms.
 - Samsat kalong (samlong)
 - Pembayaran elektronik (lewat atm, sms banking)
2. OPD Pengelola Retribusi perlu meninjau ulang tarif retribusi yang ada, Penyesuaian tarif diperlukan, tentunya tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dimasyarakat.
 3. Pemerintah Provinsi Banten melalui OPD perlu berinovasi mencari sumber sumber penerimaan daerah yang lain dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan, seperti revitalisasi BUMD.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Bappeda Provinsi Banten, yang telah memfasilitasi hingga terlanaksananya kajian ini sampai selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari Jurnal Inovasi yang telah memberikan rekomendasi perbaikan bagi tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI. 2005. Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

- Deddy K. 2006. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah; Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah, Makalah, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
- Erlangga Agustino Landiyanto.2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah; Studi Kasus Kota Surabaya, Cures Working Paper 05/01. Januari 2005
- Hamrolie Harun. 2003. Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, BPFE UGM. Yogyakarta.
- Haryanto, Joko Tri. 2016. Mapping the Local Own Resources (PAD), Performance and Regional Dependence in Indonesia 2008-2014 : Quadrant Method Approach. Journal of Home Affairs Gove. Vol : 9 (41-52)
- Haryanto, J.T. 2016. Regional Financial Performance Evaluation In The Indonesian Fiscal Decentralisation. Bali.
- Hartoyo, N. 2014. Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Daerah. Artikel Keuangan Daerah. Kenterian Keuangan Republik Indonesia.
- Imron, M.B. 2015. Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Desa Wisata. Jurnal Bina Praja 7 (4)279-288. <http://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.279-288>
- Josef Riwu Kaho. 1991. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Rajawali Press. Jakarta.
- Machfud Sidik. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah", Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002
- Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta.
- Mustaqiem. 2008. Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nick Devas. 1989. Keuangan Pemerintah Indonesia. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat. 2004. Hukum Pajak dan Permasalahannya, Refika Aditama. Bandung.
- Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (Centre for Local Government Innovation). 2003. Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Roundtable Discussion YIPD/CLGI, Jakarta.

Sumber Lain :

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-908/K/2011 tentang Pedoman Layanan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Daerah. Agustus 2011

Peraturan Daerah Provinsi Banten No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten No 26 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Peraturan Gubernur Banten No 43 Tahun 2015 tentang Penghapusan BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya serta penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB